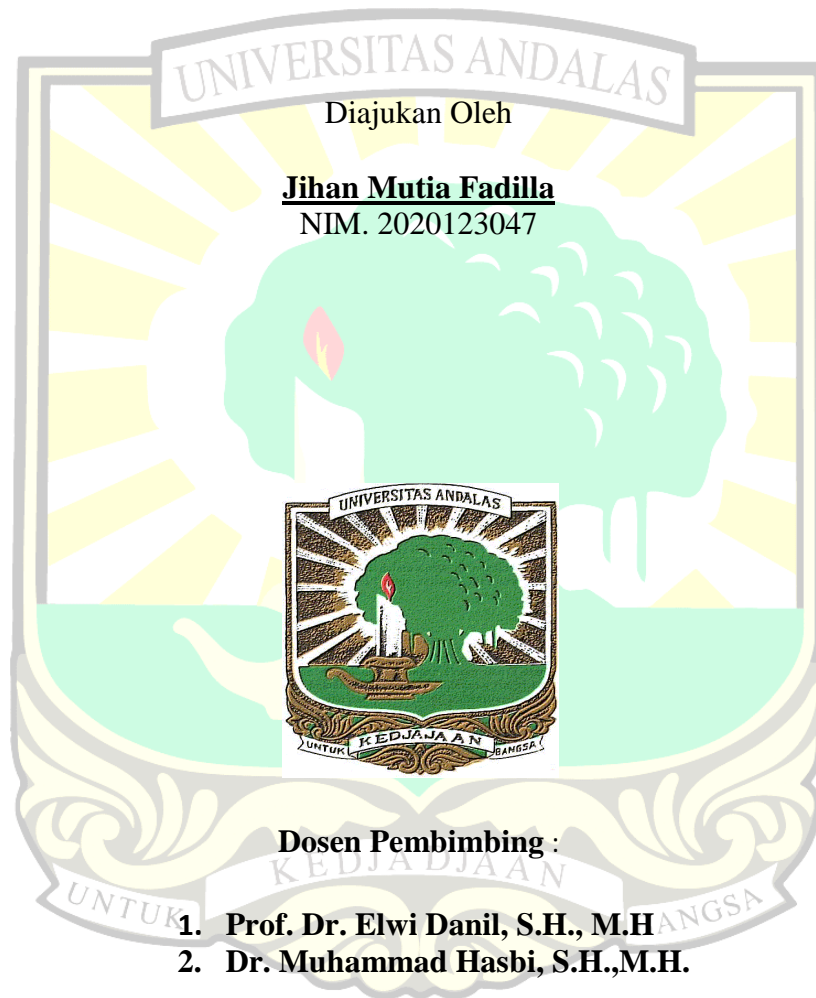


**PENGGUNAAN HAK INKAR SEBAGAI SAKSI
OLEH NOTARIS PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

TESIS

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*



**PROGRAM STUDI PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

PENGGUNAAN HAK INKAR SEBAGAI SAKSI OLEH NOTARIS PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

(Jihan Mutia Fadilla, NIM. 2020123047, Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2022, 132 halaman)

ABSTRAK

Notaris tersangkut dan terlibat dalam suatu perselisihan perkara perdata maupun pidana dimungkinkan karena berawal dari para pihak yang membuat akta dihadapannya, selanjutnya perselisihan tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik/polisi atau penuntut/jaksa, dan penyidik/polisi atau penuntut/jaksa yang berlanjut ke pengadilan. Dalam kenyataannya, telah ada kejadian yang menimpa Notaris yang tidak bersedia memenuhi panggilan dalam proses penegakan hukum, dimungkinkan akan dipanggil secara paksa atau sementara ditangkap atau ditahan, karena dianggap menghalang-halangi/mengganggu pemeriksaan oleh pihak penegak hukum. Adanya konsep hak ingkar sebagai saksi atau pemberian keterangan sehubungan dengan proses penegakan hukum, hal ini erat keterkaitannya dengan Sumpah jabatan Notaris ini sendiri, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berupa pembuatan akta notaris dari orang yang datang menghadap kepadanya, harus merahasiakan apa saja yang telah dibuatnya berupa akta yang dijadikan minuta atau asli akta yang dijaga kerahasiaannya dan menolak memberikan keterangan atau mengingkari pemanggilan dengan klarifikasi sesuai aturan undang-undang jabatan notaries. Permasalahan ini menarik dilakukan pengkajian secara ilmiah dengan rumusan masalah tentang bagaimana penggunaan hak ingkar bagi notaris pada sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, bagaimana kedudukan akta jika tidak notaris memberikan jawaban langsung sebagai saksi persidangan perkara pidana terhadap akta yang isinya bertentangan dengan kehendak salah satu pihak berperkara dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap notaris dalam proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri pekanbaru. Untuk memecahkan permasalahan digunakan pendekatan yuridis normatif dengan data utamanya adalah data sekunder yang berbentuk bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa penggunaan hak ingkar bagi notaris pada sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk pada dasarnya sama saja penggunaan hak ingkar tersebut secara normatif disemua tingkat peradilan yang ada karena telah ditentukan dalam peraturan undang-undang jabatan notaris dan ketentuan lainnya yang mengikat, artinya hak ingkar pada dasarnya untuk melindungi kerahasiaan atas akta yang dibuat notaris kecuali ditentukan lain dalam ketentuan lainnya, seperti hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pajak dan notaries melakukan perbuatan melawan hukum diluar dari akta yang dibuatnya, seperti penyalahgunaan narkoba, pidana pencurian dan tertangkap tangan. Kedudukan akta notaris pada dasarnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika isi akta bertentangan dengan kehendak para pihak hal ini tidak dimungkinkan terjadi karena para pihak menanda tangannya dan disimpan sebagai minuta akta atau asli akta, kecuali pada waktu perumusan akta terjadi pemalsuan, artinya isi akta dibacakan pada waktu akan di tanda tangani, dalam proses persidangan minuta akta bisa saja dibacakan atas permintaan hakim. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap notaris dalam proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri pekanbaru, disamping adanya hak ingkar juga izin untuk memberikan keterangan pada sidang pengadilan jika telah mendapat persetujuan dari majelis kehormatan notaries dan mendapat pendampingan dari majelis, artinya perlindungan dapat dalam bentuk preventif dan refresif.

Kata kunci : Penggunaan hak ingkar, saksi dan persidangan perkara pidana

**USE OF THE RIGHT OF REFUSE AS A WITNESS BY A NOTARY
AT CRIMINAL CASE TRIAL IN STATE COURT
NEW PEKANBARU**

(Jihan Mutia Fadilla, NIM. 2020123047, Notary Masters Study Program,
Faculty of Law, University of Andalas Padang, 2022, 132 pages)

ABSTRACT

Notaries are involved and involved in a civil or criminal case dispute, it is possible because it starts from the parties who made the deed before him, then the dispute is reported to the investigator/police or prosecutor/prosecutor, and the investigator/police or prosecutor/prosecutor who proceeds to court. In reality, there have been incidents that have happened to Notaries who are not willing to comply with the summons in the law enforcement process, it is possible to be summoned by force or temporarily arrested or detained, because they are considered obstructing/interfering with the investigation by law enforcement authorities. The existence of the concept of the right of denial as a witness or providing information in connection with the law enforcement process, this is closely related to the oath of office of the Notary itself, that the notary in carrying out his position in the form of making a notarial deed from the person who comes before him, must keep secret what he has made in the form of a deed that is used as a minuta or original deed that is kept confidential and refuses to provide information or deny the summons with clarification in accordance with the provisions of the law on the position of a notary. This problem is interesting to do a scientific study with the formulation of the problem of how to use the right of denial for a notary in a criminal case trial at the Pekanbaru District Court, how is the position of the deed if the notary does not provide a direct answer as a witness to the trial of a criminal case against a deed whose contents are contrary to the will of one of the parties. litigation and what forms of legal protection can be carried out against a notary in the law enforcement process at the Pekanbaru District Court. To solve the problem, a normative juridical approach is used with the main data being secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research and discussion that the use of the right of refusal for a notary in a criminal case trial at the Pekanbaru District Court is basically the same as the normative use of the level right at all levels of the existing judiciary because it has been determined in the statutory regulations for the position of a notary and other binding provisions, This means that the right of denial is basically to protect the confidentiality of the deed made by a notary unless otherwise specified in other provisions, such as matters relating to corruption, taxes and the notary commits acts against the law outside of the deed he made, such as narcotics abuse, criminal theft and being caught. hand. The position of a notary deed basically has perfect evidentiary power, if the contents of the deed are against the will of the parties this is not possible because the parties signed it and kept it as a minuta of the deed or the original deed, except when the formulation of the deed occurred forgery, meaning that the contents of the deed were read out. at the time it will be signed, in the trial process the minutes of the deed may be read out at the request of the judge. The form of legal protection that can be carried out against a notary in the law enforcement process at the Pekanbaru District Court, in addition to the right to deny it is also a permit to provide information at the court session if it has received approval from the notary honorary council and received assistance from the assembly, meaning that protection can be in the form of preventive and repressive.

Keywords: Use of the right of denial, witnesses and trial of criminal cases

